



RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG 2020-2024





RENCANA STRATEGIS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA SABANG 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SABANG
2020 – 2024**

No. Publikasi : 11724
Katalog BPS : 1201005.1172
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : ii + 48

Naskah :
Subbagian Tata Usaha

Gambar Kulit :
Seksi IPDS BPS Kota Sabang

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Sabang

Dicetak oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Sabang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Salah satu kunci keberhasilan perencanaan adalah tersedianya data dan statistik yang andal dan terpercaya. Data dan statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Kota Sabang (Renstra BPS Kota Sabang) Tahun 2020-2024 merupakan rencana pembangunan di bidang statistik selama lima tahun ke depan yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan BPS. Renstra dirumuskan untuk menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran BPS Kota Sabang dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang telah ditetapkan.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Kota Sabang tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk perkuatan Sistem Statistik Nasional.

Sabang, Juli 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Sabang



Drs T Djohansjah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Potensi dan Permasalahan	5
BAB 2. VISI, MISI DAN TUJUAN BPS KOTA SABANG	11
2.1 Visi BPS Kaupaten Aceh Jaya	13
2.2 Misi BPS Kota Sabang	13
2.3 Tujuan BPS Kota Sabang	15
2.4 Sasaran Strategis BPS Kota Sabang	17
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Sabang	21
3.2 Kerangka Regulasi BPS Kota Sabang	32
3.3 Kerangka Kelembagaan	33
BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
4.1 Target Kinerja BPS Kota Sabang	41
4.2 Kerangka Pendanaan	43
BAB 5. PENUTUP	45
5.1 Penutup	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Visi BPS Kota Sabang	14
Tabel 1.2 RUmusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Sabang	16
Table 2.3 tabel indicator dan target tujuan BPS kota Sabang 2020-2024	17
Tabel. 3.1 Keterkaitan, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan strategi	35
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kota Sabang Tahun 2020 – 2024	41
Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Tahun 2020 – 2024	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

27

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Kondisi Umum

1.2 Potensi dan Permasalahan

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>

1.1. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan oleh BPS menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya. Perkembangan kondisi pembangunan lima tahun kedua banyak menggunakan data BPS.

Pada tahun 2019, ekonomi Kota Sabang tumbuh sebesar 5,82 persen, lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2017, 2018, dan 2019 yang sebesar 6,07, 5,86, dan 5,86 persen. Secara umum, kinerja perekonomian pada 3 tahun terakhir periode renstra saat ini mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada akhir periode renstra sebelumnya, yaitu tahun 2012, 2013, dan 2014, dimana saat itu ekonomi tumbuh sebesar 4,18, 4,23, 4,06. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2019 mencapai 1,5326 triliun rupiah, dengan pendapatan per kapita sebesar 43,95 juta rupiah. Selain itu, *Human Development Index* (HDI) selalu mencatatkan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun, terakhir mencapai 70,21 pada tahun 2019 setelah pada tahun 2014 sebesar 69,54. Sementara itu, Persentase penduduk miskin mengalami penurunan, dari 16,31 persen pada tahun 2018 menjadi 15,60 persen pada tahun 2019. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami kenaikan, dari 4,21 persen pada tahun 2018 menjadi 4,6 persen pada tahun 2019. Dari uraian tersebut, dapat dilihat walaupun perekonomian tumbuh, IPM meningkat dan kemiskinan menurun beberapa tahun terakhir, namun pengangguran mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir.

Penyediaan data dan informasi statistik berkualitas yang dilakukan oleh BPS sebagai amanat dari UU no 16 Tahun 1997, sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah untuk pengambilan keputusan yang efektif dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Selain pemerintah, data BPS juga dibutuhkan oleh pelajar atau mahasiswa untuk penelitian dan sektor swasta untuk mendapatkan gambaran yang akurat tentang lingkungan makro guna perencanaan bisnis. Demikian pula dengan lembaga internasional yang menggunakan data BPS untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi dan sosial yang akurat di Indonesia.

BPS sebagai pelaksana statistik dasar dan dalam rangka melaksanakan amanat UU No 16 Tahun 1997, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;

2. Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal; dan
3. Agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Kota Sabang untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat, serta memanfaatkan sosial media dalam rangka mensosialisasikan kegiatan Statistik yang dilaksanakan oleh BPS Kota Sabang. Selama periode Renstra 2015-2019 berbagai kegiatan kerja sama dan hubungan kelembagaan telah dilaksanakan di antaranya penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) baik dengan instansi pemerintah maupun lembaga lain, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik. Berbagai kesuksesan yang dicapai di periode Renstra 2015-2019 akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam berbagai upaya pencapaian yang ditempuh dalam periode yang baru ini.

Selain upaya mewujudkan SSN, BPS Kota Sabang juga memperhatikan tuntutan masyarakat akan data dan informasi yang tepat waktu, lebih rinci, beragam, dan mudah dipahami dilaksanakan oleh BPS Kota Sabang selama periode Renstra 2015-2019 melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Ragam data dan indikator sosial-ekonomi yang dihasilkan, antara lain:

1. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
2. Angka kemiskinan yang disajikan dalam bentuk Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Kota Sabang yang dirilis pada website BPS Kota Sabang. Selain dirilis pada website BRS ini juga disampaikan melalui *hardcopy* pada instansi terkait.
3. Angka pertumbuhan ekonomi yang disajikan dalam bentuk table yang dirilis pada website BPS Kota Sabang. Selain dirilis pada website, juga disampaikan melalui *hardcopy* pada instansi terkait.

Dalam hal diseminasi data, untuk kepentingan pengguna data BPS Kota Sabang menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain : Pelayanan Statistik Terpadu baik di kantor BPS Kota Sabang dan Data Indikator-indikator strategis yang tersedia di Website BPS Kota Sabang yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja.

Dalam upaya mendukung dan terus menjaga terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS Kota Sabang

diantaranya adalah penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Anggaran dan Kegiatan (SIMANTAN). Dengan aplikasi SIMANTAN dapat memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran di BPS Kota Sabang.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain :

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Potensi BPS diharapkan dapat menjadi *booster* transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Aceh. BPS Kota Sabang memiliki peran yang krusial di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2015-2019, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

1.2.2. Permasalahan

BPS Kota Sabang telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020 – 2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kota Sabang harus mendapatkan respon yang tepat.

Sehingga citra BPS Kota Sabang sebagai pelopor data terpercaya bagi semua dari sudut pandang responden maupun masyarakat umum sebagai pengguna data dapat terus meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kota Sabang merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kota Sabang adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kota Sabang dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data dan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan daerah pemekaran.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan

survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

BPS Kota Sabang memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi.

Disisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah big data dan data administrative) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS. Pentingnya big data tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain :

- 1) Pengurangan biaya,
- 2) Pengurangan waktu,
- 3) Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
- 4) Pengambilan keputusan yang cepat.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Kota Sabang faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Setiap upaya dilaksanakan demi menghasilkan data akurat. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Kota Sabang telah teridentifikasi, dan berusaha di tangulangi dengan upaya antara lain berbagai pelatihan/briefing untuk setiap kegiatan, *capacity building*, dan *sharing knowledge* yang dikemas dengan berbagai metode serta konten yang menarik dan lain sebagainya. Selain itu, dorongan dalam rangka peningkatan SDM juga sangat diperhatikan sehingga sangat dianjurkan agar setiap pegawai dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka peningkatan

kualitas dan kapasitas pegawai. Dalam periode renstra 2014-2019 terdapat 1 orang pegawai BPS Kota Sabang yang melaksanakan Tugas Belajar Pasca Sarjana (S2) namun pegawai tersebut sudah mutase ke satker lain di luar Provinsi Aceh. Berbagai hal yang telah ditempuh ini bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan terkait SDM antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kota Sabang saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM pada akhir renstra sebelumnya adalah yang pertama masih belum memiliki dua kasi/kasubbag definitif yaitu kasubbag TU dan kasi produksi, yang kedua jumlah pegawai yang masih kurang yaitu 10 pegawai (termasuk kepala BPS).

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Sabang

2.1 Visi Badan Pusat Statistik Kota Sabang

2.2 Misi Badan Pusat Statistik Kota Sabang

2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Sabang

2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik Kota Sabang

<https://sabangkota.bps.go.id>

2.1 Visi BPS Kota Sabang

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

2.2 Misi BPS

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 2.1 Visi BPS Kota Sabang 2020 - 2024

MISI BPS Kota Sabang 2020 -2024	
VISI BPS Kota Sabang 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju
	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional</i> 2. <i>Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan</i> 3. <i>Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional</i> 4. <i>Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.</i>

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Kota Sabang tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ,maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretibility* (interpretibilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrase dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik

bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan BPS Kota Sabang

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrase, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistic penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Kota Sabang untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan berikut ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Sabang 2020 - 2024

		MISI BPS KOTA SABANG 2020 -2024			
		VISI BPS KOTA SABANG 2020 - 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional	2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
TUJUAN	1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	2. Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	

Rumusan tujuan BPS Kota Sabang dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah :

1. Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan :
 - Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan inernasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :
 - Misi ke-2 : Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3 : Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :
 - Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan :
 - Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuna pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrase, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS : sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh

komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistic yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistic di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2.3 tabel indicator dan target tujuan BPS kota Sabang 2020-2024

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	90	90	91	92	93
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	0	0	0	0	0
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	0	0	0	0	0
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat	57,6	57,7	57,8	57,9	58,0

2.4 Sasaran Strategis BPS Kota Sabang

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan *eksternal*) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan *internal*).

Renstra BPS Kota Sabang tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kota Sabang ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kemnetrian/Lembaga, maupun antar Kemnetrian / Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari : (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan logic model framework dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
 - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customer relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator :
 - i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS

- ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - iv. Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
 - v. Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - iv. Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
 - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2 Perspektif Stakeholder

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS



Gambar Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kota Sabang 2020 - 2024

Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- ☑ Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
- ☑ Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
- ☑ Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b. Efektif
memberikan hasil maksimal.
- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
- e. Sistemik

meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
- b. Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan.
- d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
- e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.
- b. Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
- c. Tulus
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Adil
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 3

Arah Kebijakan dan Strategi

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Sabang

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

<https://sabangkota.bps.go.id>

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - a) Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - b) Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - iv. Membuat customer relationship management;
 - v. Menyusun data mining pengguna data;
 - vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
 - i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - iv. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan

- v. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
 - ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.
 6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas. Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Devision*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:
 - i. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
 - ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu:

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (*koheren*), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata

di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

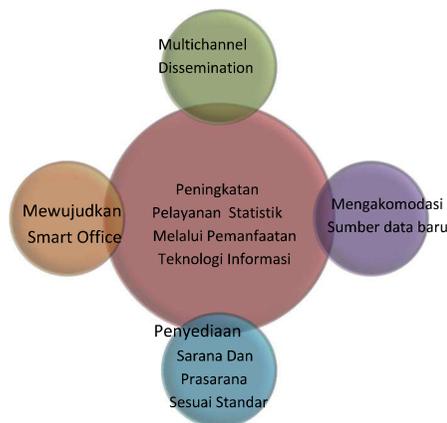
Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi strategic enabler dan decision support system (DSS).

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui multichannel dissemination; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan Smart Office.



Gambar Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya remapping dan reengineering infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. Cross interchange antara needs dan wants adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai

tools/enabler. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya tool dan enabler dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan style bagi modern office.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastuktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastuktur, "IT for Function and Solution as empowering achievement". Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastuktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastuktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (wants), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (needs). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah Better, Faster, and Cheaper saat ini haruslah menyentuh pada reliable and accountable.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastuktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi "role and rule in system and infrastructure". Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai keypoint successor. Perubahan sistem dan infrastuktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak miss track. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastuktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastuktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.

- b) Memastikan kemitakhiran data dengan :
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.

- c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

2. Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- c) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- d) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)
 - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaikan Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family
 - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi

- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
 - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanaan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan *grand design smart office*
 - ii. Implementasi *smart office* di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil Trilateral Meeting Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- i. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- ii. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;

- iii. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- iv. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- v. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- vi. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
- vii. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- viii. Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- ix. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- x. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- xi. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Pengalihan, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

- a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.
- b) Gender
Pengarutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:
- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
 - ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
 - iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS
 - iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.
- c) Modal Sosial Budaya
Pengarutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.
BPS mendukung pengarutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.
Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada Framework for Cultural Statistics (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik tangible (benda) maupun intangible (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.
- d) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (value) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

- 3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* atau disingkat *COVID-19* merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020.

tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode

- wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
 3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
 4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
 5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Sabang

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Nagan Raya mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024

Tabel. 3.1 Keterkaitan, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan strategi

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar	Meningkatnya akurasi data, melalui integrasi proses bisnis, serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas Memastikan ketepatan data dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data; penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan. Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE Menyediakan/Membangun
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	S.2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Peningkatan Penggunaan Data BPS dalam perencanaan dan pembangunan nasional Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia	Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik Nasional Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	S.3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN	Menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN)
		Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional	Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN
		Penyediaan statistik sektoral	Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan	S.4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing	Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
reformasi birokrasi		dalam kerangka tata kelola kelembagaan		Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan	Meningkatkan efektivitas	
				Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari		
				Pembinaan tenaga fungsional	Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional		
				Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan	Meningkatkan efektivitas	
				Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.	Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan	Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan	
					Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem		

3.2 Program dan Kegiatan BPS Kota Sabang

Sejalan dengan Renstra BPS 2020-2024, BPS Kota Sabang mempunyai satu Program Teknis dan satu Program Generik. Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Kota Sabang yaitu Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen di BPS Kota Sabang terdiri dari 1 (satu) kegiatan generik yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi. Sementara Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- Pengembangan dan Analisis Statistik;
- Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;

- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

<https://sabangkota.bps.go.id>

4.1 Target Kinerja BPS Kota Sabang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
BPS Kota Sabang Tahun 2020 - 2024**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90	91	92	93	IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	10	10	20	30	30	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	0	0	0	0	0	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sectoral dan khusus sesuai standar (%)	4	4	5	6	6	IPDS
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	0	0	0	0	0	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, IPDS, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	57,6	57,7	57,8	57,9	58,0	Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	93,00	93,00	94,00	94,00	95,00	Tata Usaha

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS memiliki sasaran program dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
- b) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- c) Progress pengembangan jabatan fungsional baru

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS
- b) Jumlah satker yang menerapkan smart office
- c) Dokumen *grand design smart office*

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (*Outcome*):

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
- b) Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- c) Jumlah K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait satu data Indonesia

Sasaran Program (*Outcome*):

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan Indikator Kinerja Program: Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya

4.2 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Tahun 2020 - 2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2088.109	2285.835	2483.487	2378.916	2475.275
Kegiatan 2886 Bagian Tata Usaha	2088.109	2285.835	2483.487	2378.916	2475.275
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1232.529	826.873	691.623	662.380	749.736
Kegiatan 2897 Bid IPDS	27.620	28.903	29.915	30.962	32.045
Kegiatan 2898 Bid Nerwilis	28.684	30.553	33.003	35.497	38.036
Kegiatan 2899 Bid Nerwilis	9.315	9.885048	10.31058	10.74472	11.18777
Kegiatan 2900 Bid IPDS	2.185	2.353	2.463	2.575	2.689
Kegiatan 2902 Bid Distribusi	7.979	9.933	10.200	10.475	10.760
Kegiatan 2903 Bid Distribusi	10.975	11.359	11.757	12.168	12.594
Kegiatan 2904 Bid Produksi	31.727	36.543	39.573	42.615	45.668
Kegiatan 2905 Bid Sosial	809.451	327.914	138.476	153.113	172.951
Kegiatan 2906 Bid Sosial	220.266	237.313	301.505	256.471	267.347
Kegiatan 2907 Bid Sosial	12.173	50.965	27.202	14.443	57.014
Kegiatan 2908 Bid Distribusi	25.437	30.411	34.646	38.889	43.141
Kegiatan 2909 Bid Produksi	6.893	7.134	7.384	7.642	7.910
Kegiatan 2910 Bid Produksi	39.824	43.604	45.189	46.786	48.393

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam table.

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 5

Penutup

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>

Renstra BPS Kota Sabang Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penguatan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kota Sabang untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra BPS Kota Sabang periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kota Sabang 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

<https://sabangkota.bps.go.id>

Lampiran

<https://sabangkota.bps.go.id>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik							
	SS 1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas						IPDS
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90.00	91.00	92.00	93.00	
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	10.00	10.00	20.00	30.00	30.00	
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN						IPDS
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	4	4	5	6	6	
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I						IPDS
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	0	10	15	20	25	
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan						TATA USAHA
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	57.6	57.7	57.8	57.9	58	
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen							TATA USAHA
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tatakelola kelembagaan						
	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)	10	40	50	50	50	
	Progress Pengembangan jabatan fungsional baru (%)	0	0	0	0	0	
	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS						
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	57.6	57.7	57.8	57.9	58	
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	
	Jumlah satker yang menerapkan smart office	0	0	0	0	0	
	Dokumen grand design smart office	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugTeknis Lainnya BPS Provinsi)						TATA USAHA
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS		0	0	0	0	0
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	0	0	0	0	0
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi = xx unit	0	0	0	0	0
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	0	0	0	0	0
	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	0	0	0
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	0	0	0
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik		1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	44	44	44	44	44
Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	100	100	100
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	95	95	95	95	95
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik						IPDS
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas						
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90	91	92	93
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90	91	92	93
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN						
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	4	4	5	6	6
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	0	0	0	0	0
	Persentase K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%)	0	0	0	0	0
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I						
	Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%)	0	0	1	1	1

KEGIATAN 2896: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan analisis statistik)						Nerwilis
Tersedianya data Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas	2	2	2	2	2	
Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2	
Jumlah model statistik sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	
Jumlah Release data Analisis dan Pengembangan Statistik yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
Jumlah Indikator Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Gender yang disusun	0	0	0	0	0	
Jumlah Indikator/data yang terkait SDG yang terdapat pada publikasi	0	0	0	0	0	
Jumlah Kajian penghitungan Indikator berbasis metode Small Area Estimation (SAE)	0	0	0	0	0	
Jumlah Kajian Pemanfaatan Big Data untuk mendukung official statistics	0	0	0	0	0	
Jumlah kegiatan statistik di Subject Matter yang telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Statistik (PK) secara mandiri	0	0	0	0	0	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	0	0	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik		0	0	0	0	
KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)						IPDS
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1	1	1	1	1	
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	6	6	6	6	6	
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	0	1	2	2	2	
Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	30	30	30	30	30	
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	0	0	0	1	1	
Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	0	0	0	1	1	
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan	1	1	1	1	1	
Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	25	30	35	40	45	
Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	91	92	92	93	94	
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	4200	4500	4800	5000	5200	
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	2	3	4	5	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	2	3	4	5	
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	90	90	91	92	93	
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	90	90	91	92	93	

KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)							Nerwilis
Tersedianya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas							
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1	1	
Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	0	0	0	0	0	0	
Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	5	5	5	5	5	5	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100	100	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	100	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	100	
Persentase permintaan data PDB/PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)	100	100	100	100	100	100	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I							
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	1	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	1	
KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi)							Nerwilis
Tersedianya data Neraca Produksi yang berkualitas							
Jumlah Kajian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan	0	54	54	54	54	54	
Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1	1	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	100	
Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu	0	0	0	0	0	0	
Diskrepansi Statistik PDB/PDRB Lapangan Usaha	5	5	5	5	5	5	
Persentase permintaan data PDB/PDRB; Tabel I-O; dan PDB Ekonomi Hijau yang disetujui (%)	95	95	95	95	95	95	
Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) (%)	100	100	100	100	100	100	
Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan berbasis framework terintegrasi seperti SUT (%)	100	100	100	100	100	100	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I							
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	0	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2900: Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)						IPDS
	Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna					
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei	0	0	0	0	0
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir	0	0	0	0	0
	Persentase data SBR yang terupdate (%)	0	0	0	0	0
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100	100	100	100	100
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara	0	0	0	0	0
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir	0	0	0	0	0
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	0	0	0	0	0
	Persentase subject matter yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Dit. FMSS (%)	0	0	0	0	0
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)	0	0	0	0	0
	Jumlah publikasi/laporan MSA yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0
KEGIATAN 2901: Direktorat Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)						IPDS
	Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal					
	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu (%)	100	96	96	96	96
	Persentase uptime layanan jaringan komunikasi (%)	0	99	99	99	99
	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir (%)	0	75	75	75	75
	Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan service level agreement (%)	0	100	100	100	100
	Jumlah penambahan koleksi data yang dihimpun	0	20	20	20	20
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	0	4	4	4	4
	Persentase pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi yang diselesaikan (%)	0	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Statcap Cerdas Bidang TI yang terbit tepat waktu	0	4	4	4	4
	Indeks kepuasan layanan TI	80	83	86	89	92

KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)						Distribusi
Tersedianya Data Statistik Distribusi Yang Berkualitas						
Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	0	0	0	0	0	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)						Distribusi
Tersedianya Data Statistik Harga Yang Berkualitas						
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0	
Jumlah Release data Statistik Harga yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
Jumlah indikator/data yang memuat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi	0	0	0	0	0	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)							Produksi
	Tersedianya Data Statistik Industri Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik	0	0	0	0	0	
KEGIATAN 2905 : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)							Sosial
	Tersedianya Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas						
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)							Sosial
	Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	1	1	1	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	1	1	1	
<hr/>							
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)							Sosial
	Tersedianya Data Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	1	2	2	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	1	2	2	

KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)							Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Jumlah Release data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	1	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	1	
KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)							Produksi
	Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	0	0	0	0	0	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)							Produksi
	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SABANG**

Jalan.....

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Sabang

- 2.1 Visi Badan Pusat Statistik Kota Sabang
- 2.2 Misi Badan Pusat Statistik Kota Sabang
- 2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik Kota Sabang
- 2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik Kota Sabang

<https://sabangkota.bps.go.id>

2.1 Visi BPS Kota Sabang

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

2.2 Misi BPS

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 2.1 Visi BPS Kota Sabang 2020 - 2024

VISI BPS Kota Sabang 2020-2024	MISI BPS Kota Sabang 2020 -2024	
	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	1. <i>Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional</i>
2. <i>Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan</i>		
3. <i>Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional</i>		
4. <i>Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.</i>		

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Kota Sabang tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ,maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretibility* (interpretibilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrase dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik

bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan BPS Kota Sabang

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi.

Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrase, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Disamping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Kota Sabang untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan berikut ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kota Sabang 2020 - 2024

		MISI BPS KOTA SABANG 2020 -2024	
VISI BPS KOTA SABANG 2020 - 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	1.	Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2.	Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3.	Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4.	Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN		1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
		2.	Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN
		3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
		4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Rumusan tujuan BPS Kota Sabang dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah :

1. Tujuan 1 : Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan :
 - Misi ke-1 : Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan inernasional;
2. Tujuan 2: Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :
 - Misi ke-2 : Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3 : Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :
 - Misi ke-3 : Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistic untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4 : Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan :
 - Misi ke-4 : Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuna pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrase, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS : sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh

komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistic yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistic di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Table 2.3 tabel indikator dan target tujuan BPS kota Sabang 2020-2024

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	90	90	91	92	93
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	0	0	0	0	0
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	0	0	0	0	0
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Hasil Penilaian SAKIP Oleh Inspektorat	57,6	57,7	57,8	57,9	58,0

2.4 Sasaran Strategis BPS Kota Sabang

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan *eksternal*) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan *internal*).

Renstra BPS Kota Sabang tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kota Sabang ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kemnetrian/Lembaga, maupun antar Kementrian / Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari : (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif stakeholders, perspektif customers, perspektif internal process, dan perspektif learning and growth. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan logic model framework dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
T1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas
T2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM statistik yang unggul yang berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
 - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customer relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - ix. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - x. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator :
 - i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS

- ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - iv. Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
 - v. Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - iii. Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - iv. Jumlah NSO yang menerima *statistical capacity building* di BPS
 - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Stakeholder

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS



Gambar Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kota Sabang 2020 - 2024

Nilai-Nilai Inti BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- ☐ Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
- ☐ Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
- ☐ Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesionalisme

Profesionalisme merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
- b. Efektif
memberikan hasil maksimal.
- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
- e. Sistemik

meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Dedikasi**
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
- b. **Disiplin**
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. **Konsisten**
selarasnya kata dengan perbuatan.
- d. **Terbuka**
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
- e. **Akuntabel**
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Terpercaya**
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.
- b. **Jujur**
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
- c. **Tulus**
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
- d. **Adil**
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 3

Arah Kebijakan dan Strategi

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Sabang

3.3 Kerangka Regulasi

3.4 Kerangka Kelembagaan

<https://sabangkota.bps.go.id>

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;
Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - a) Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei dan
 - b) Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b) Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
 - ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
 - iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
 - iv. Membuat customer relationship management;
 - v. Menyusun data mining pengguna data;
 - vi. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.
 - i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.

4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
 - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
 - ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - iv. Meningkatkan penerapan smart office pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan

- v. Menyusun dokumen grand design smart office berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia; Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:
 - i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik dan
 - ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.
 6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas. Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (*United Nation Statistics Division*) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (*principle quality*) berdasarkan 10 UN *Fundamental Principle of Official Statistics*. Strategi yang dilakukan:
 - i. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik
 - ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai 6 arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 3 bidang utama prioritas BPS, yaitu:

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (*koheren*), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata

di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

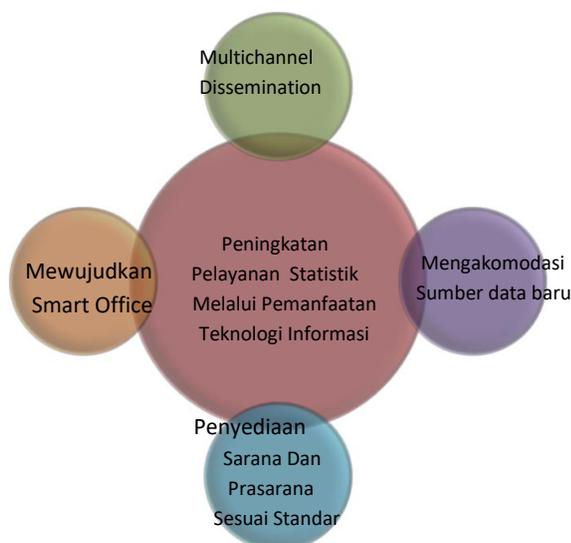
Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi strategic enabler dan decision support system (DSS).

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya layanan statistik melalui multichannel dissemination; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan Smart Office.



Gambar Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya remapping dan reengineering infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. Cross interchange antara needs dan wants adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai

tools/enabler. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya tool dan enabler dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan style bagi modern office.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastuktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastuktur, “IT for Function and Solution as empowering achievement”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastuktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastuktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (wants), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (needs). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah Better, Faster, and Cheaper saat ini haruslah menyentuh pada reliable and accountable.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastuktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “role and rule in system and infrastructure”. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai keypoint successor. Perubahan sistem dan infrastuktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak miss track. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastuktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastuktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu :

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui :
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.

- b) Memastikan kemitakhiran data dengan :
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.

- c) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE
- f) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektor
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia

2. Meningkatkan Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN
- b) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- c) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- d) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA)
 - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family
 - vii. Talent pool untuk suksesi organisasi

- d) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional)
 - ii. Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.
- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Pewujudan *Smart Office* di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan *grand design smart office*
 - ii. Implementasi *smart office* di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil Trilateral Meeting Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- i. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- ii. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;

- iii. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- iv. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- v. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- vi. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
- vii. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- viii. Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- ix. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- x. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- xi. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

- a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tatakelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.
BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan k/l lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.
- b) Gender
Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:
- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik
 - ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan
 - iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS
 - iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.
- c) Modal Sosial Budaya
Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.
BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.
Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada Framework for Cultural Statistics (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik tangible (benda) maupun intangible (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.
- d) Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pematapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (value) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pematapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

- 3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19 *CORONA VIRUS DISEASE 2019* atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Kepres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020.

tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan suatu tindakan perubahan pola bekerja, belajar dan beribadah serta penerapan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode

wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.

2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/ telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online dari rumah.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BPS Kota Sabang

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Arah kebijakan penyelenggaraan BPS Kabupaten Nagan Raya mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024

Tabel. 3.1 Keterkaitan, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan strategi

TUJUAN		SASARAN STRATEGIS		ARAH KEBIJAKAN		STRATEGI	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas		Peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar		Meningkatnya akurasi data, melalui integrasi proses bisnis, serta penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas Memastikan kemutakhiran data dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data; penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan. Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistic Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE Menyediakan/Membangun
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	S.2.	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN		Peningkatan Penggunaan Data BPS dalam perencanaan dan pembangunan nasional Terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia		Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistic Nasional PEMBERDAYAAN jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	S.3.	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN		Menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN)
					Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional		Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN
					Penyediaan statistik sektoral		Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah)
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan	S.4.	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing		Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja		Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
reformasi birokrasi	dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan Meningkatkan efektivitas
		Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja	Mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari
		Pembinaan tenaga fungsional	Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
		Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien	Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan Meningkatkan efektivitas
		Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima	Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar.	Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem

3.2 Program dan Kegiatan BPS Kota Sabang

Sejalan dengan Renstra BPS 2020-2024, BPS Kota Sabang mempunyai satu Program Teknis dan satu Program Generik. Program Teknis adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS). Adapun Program Generik BPS Kota Sabang yaitu Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen di BPS Kota Sabang terdiri dari 1 (satu) kegiatan generik yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi. Sementara Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu:

- Pengembangan dan Analisis Statistik;
- Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;

- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1 Target Kinerja

4.2 Kerangka Pendanaan

<https://sabangkota.bps.go.id>

4.1 Target Kinerja BPS Kota Sabang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga tahun 2020 – 2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2020 – 2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kota Sabang Tahun 2020 - 2024

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90	91	92	93	IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	10	10	20	30	30	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, Nerwilis
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	0	0	0	0	0	IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sectoral dan khusus sesuai standar (%)	4	4	5	6	6	IPDS
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	0	0	0	0	0	Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, IPDS, dan Nerwilis
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	57,6	57,7	57,8	57,9	58,0	Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	93,00	93,00	94,00	94,00	95,00	Tata Usaha

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS memiliki sasaran program dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (Outcome):

Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
- b) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- c) Progress pengembangan jabatan fungsional baru

Sasaran Program (Outcome):

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS

Sasaran Program (Outcome):

Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS
- b) Jumlah satker yang menerapkan smart office
- c) Dokumen *grand design smart office*

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (Outcome):

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Sasaran Program (Outcome):

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- a) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar
- b) Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- c) Jumlah K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait satu data Indonesia

Sasaran Program (Outcome):

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan Indikator Kinerja Program: Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya

4.2 Kerangka Pendanaan

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Tahun 2020 - 2024

Program / Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
054.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2088.109	2285.835	2483.487	2378.916	2475.275
Kegiatan 2886 Bagian Tata Usaha	2088.109	2285.835	2483.487	2378.916	2475.275
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1232.529	826.873	691.623	662.380	749.736
Kegiatan 2897 Bid IPDS	27.620	28.903	29.915	30.962	32.045
Kegiatan 2898 Bid Nerwilis	28.684	30.553	33.003	35.497	38.036
Kegiatan 2899 Bid Nerwilis	9.315	9.885048	10.31058	10.74472	11.18777
Kegiatan 2900 Bid IPDS	2.185	2.353	2.463	2.575	2.689
Kegiatan 2902 Bid Distribusi	7.979	9.933	10.200	10.475	10.760
Kegiatan 2903 Bid Distribusi	10.975	11.359	11.757	12.168	12.594
Kegiatan 2904 Bid Produksi	31.727	36.543	39.573	42.615	45.668
Kegiatan 2905 Bid Sosial	809.451	327.914	138.476	153.113	172.951
Kegiatan 2906 Bid Sosial	220.266	237.313	301.505	256.471	267.347
Kegiatan 2907 Bid Sosial	12.173	50.965	27.202	14.443	57.014
Kegiatan 2908 Bid Distribusi	25.437	30.411	34.646	38.889	43.141
Kegiatan 2909 Bid Produksi	6.893	7.134	7.384	7.642	7.910
Kegiatan 2910 Bid Produksi	39.824	43.604	45.189	46.786	48.393

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam table.

<https://sabangkota.bps.go.id>

BAB 5

Penutup

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>

Renstra BPS Kota Sabang Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kota Sabang untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden.

Renstra BPS Kota Sabang periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kota Sabang 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS, baik di pusat maupun di daerah. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesionalisme, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

<https://sabangkota.bps.go.id>

Lampiran

<https://sabangkota.bps.go.id>

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian/Lembaga: Badan Pusat Statistik							
	SS 1. Meningkatkan pemanfaatan data statistik yang berkualitas						IPDS
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90.00	91.00	92.00	93.00	
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)	10.00	10.00	20.00	30.00	30.00	
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN						IPDS
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	4	4	5	6	6	
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I						IPDS
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	0	10	15	20	25	
	SS 4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan						TATA USAHA
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	57.6	57.7	57.8	57.9	58	
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	
PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen							TATA USAHA
	Meningkatnya Pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tatakelola kelembagaan						
	Persentase Pejabat yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)	10	40	50	50	50	
	Progress Pengembangan jabatan fungsional baru (%)	0	0	0	0	0	
	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS						
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	57.6	57.7	57.8	57.9	58	
	Meningkatnya Pelayanan dengan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standard						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	93.0	94.0	95.0	96.0	97.0	
	Jumlah satker yang menerapkan smart office	0	0	0	0	0	
	Dokumen grand design smart office	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2886 : (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugTeknis Lainnya BPS Provinsi)							TATA USAHA
Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana BPS		0	0	0	0	0	
	Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit	0	0	0	0	0	
	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit	0	0	0	0	0	
	Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit	0	0	0	0	0	
	Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	0	0	0	
	Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2	0	0	0	0	0	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan statistik		1	1	1	1	1	
	Jumlah Laporan Dukungan Manajemen Yang Tepat Waktu	44	44	44	44	44	
Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	
	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx (%)	100	100	100	100	100	
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)	95	95	95	95	95	
PROGRAM 06 : Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik							IPDS
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas							
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90	91	92	93	
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90	90	91	92	93	
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN							
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	4	4	5	6	6	
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%)	0	0	0	0	0	
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I							
	Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%)	0	0	1	1	1	

KEGIATAN 2896: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan analisis statistik)						Nerwilis
Tersedianya data Analisis dan Pengembangan Statistik yang berkualitas	2	2	2	2	2	
Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang terbit tepat waktu	2	2	2	2	2	
Jumlah model statistik sosial dan ekonomi	0	0	0	0	0	
Jumlah Release data Analisis dan Pengembangan Statistik yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
Jumlah Indikator Kesetaraan Gender dan pemberdayaan Gender yang disusun	0	0	0	0	0	
Jumlah Indikator/data yang terkait SDG yang terdapat pada publikasi	0	0	0	0	0	
Jumlah Kajian penghitungan Indikator berbasis metode Small Area Estimation (SAE)	0	0	0	0	0	
Jumlah Kajian Pemanfaatan Big Data untuk mendukung official statistics	0	0	0	0	0	
Jumlah kegiatan statistik di Subject Matter yang telah melaksanakan kegiatan Penjaminan Statistik (PK) secara mandiri	0	0	0	0	0	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;		0	0	0	0	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik		0	0	0	0	
KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)						IPDS
Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	1	1	1	1	1	
Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun	6	6	6	6	6	
Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa	0	1	2	2	2	
Jumlah Instansi/Institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	30	30	30	30	30	
Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi	0	0	0	1	1	
Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I	0	0	0	1	1	
Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan	1	1	1	1	1	
Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen	25	30	35	40	45	
Persentase Konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)	91	92	92	93	94	
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	4200	4500	4800	5000	5200	
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	2	3	4	5	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	2	3	4	5	
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan	90	90	91	92	93	
Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data	90	90	91	92	93	

KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)							Nerwilis
	Tersedianya data Neraca Pengeluaran yang berkualitas						
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1	
	Jumlah Release data Neraca Pengeluaran yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB menurut pengeluaran	5	5	5	5	5	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Persentase permintaan data PDB/PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	1	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	1	
KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi)							Nerwilis
	Tersedianya data Neraca Produksi yang berkualitas						
	Jumlah Kajian Rekomendasi SNA 2008 yang sudah diselesaikan	0	54	54	54	54	
	Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Jumlah Release data Neraca Produksi yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Diskrepansi Statistik PDB/PDRB Lapangan Usaha	5	5	5	5	5	
	Persentase permintaan data PDB/PDRB; Tabel I-O; dan PDB Ekonomi Hijau yang disetujui (%)	95	95	95	95	95	
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) (%)	100	100	100	100	100	
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan berbasis framework terintegrasi seperti SUT (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2900: Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)							IPDS
	Tersedianya dukungan Metodologi Sensus dan survei yang tepat guna						
	Jumlah Dokumen desain sampling Sensus dan survei	0	0	0	0	0	
	Jumlah publikasi standarisasi dan klasifikasi statistik yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Jumlah Dokumen Pengembangan kerangka Sampel survei yang mutakhir	0	0	0	0	0	
	Persentase data SBR yang terupdate (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)	100	100	100	100	100	
	Jumlah sistem aplikasi Pengembangan desain sensus dan survey yang dikembangkan dan dipelihara	0	0	0	0	0	
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir	0	0	0	0	0	
	Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate	0	0	0	0	0	
	Persentase subject matter yang melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan statistik dengan Dit. PMSS (%)	0	0	0	0	0	
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLL, kerangka sampel, maupun pemetaan)	0	0	0	0	0	
	Jumlah publikasi/laporan MSA yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
KEGIATAN 2901: Direktorat Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)							
	Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal						
	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu (%)	100	96	96	96	96	
	Persentase uptime layanan jaringan komunikasi (%)	0	99	99	99	99	
	Persentase pengembangan TIK BPS untuk integrasi statistik dari hulu ke hilir (%)	0	75	75	75	75	
	Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan service level agreement (%)	0	100	100	100	100	
	Jumlah penambahan koleksi data yang dihimpun	0	20	20	20	20	
	Jumlah pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	0	4	4	4	4	
	Persentase pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi yang diselesaikan (%)	0	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Statcap Cerdas Bidang TI yang terbit tepat waktu	0	4	4	4	4	
	Indeks kepuasan layanan TI	80	83	86	89	92	

KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)						Distribusi
Tersedianya Data Statistik Distribusi Yang Berkualitas						
Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Jumlah Release data Statistik Distribusi yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	0	0	0	0	0	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)						Distribusi
Tersedianya Data Statistik Harga Yang Berkualitas						
Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0	
Jumlah Release data Statistik Harga yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
Jumlah indikator/data yang memuat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan yang terdapat dalam publikasi	0	0	0	0	0	
Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)							Produksi
	Tersedianya Data Statistik Industri Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Jumlah Release data Statistik Industri yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance analisis dan pengembangan statistik	0	0	0	0	0	
KEGIATAN 2905 : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)							Sosial
	Tersedianya Data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Yang Berkualitas						
	Jumlah Aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Release data Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2906 : Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)							Sosial
	Tersedianya Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu	1	1	1	1	1	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	1	1	1	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	1	1	1	
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)							Sosial
	Tersedianya Data Statistik Ketahanan Sosial Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Jumlah release Statistik Ketahanan Sosial yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	1	2	2	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	1	2	2	

KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)							Distribusi
	Tersedianya Data Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Jumlah Release data Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	1	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	1	
KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)							Produksi
	Tersedianya Data Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	0	0	0	0	0	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan)							Produksi
	Tersedianya Data Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Yang Berkualitas						
	Jumlah aktivitas statistik yang mempublikasikan nilai akurasi	0	0	0	0	0	
	Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)	0	0	0	0	0	
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)	100	100	100	100	100	
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I;	0	0	0	0	0	
	Jumlah K/L/D/I yang meminta technical assistance statistik	0	0	0	0	0	

<https://sabangkota.bps.go.id>

<https://sabangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SABANG**

Jalan Teuku Umar no 28, Kuta
Ateuh, Kota Sabang